# BAB V PENUTUP

# 5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai prosedur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

* + 1. Prosedur pembayaran gaji pada pegawai negeri sipil dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah). Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penggajian pegawai negeri sipil :
			1. Penggajian pegawai pada Bapenda Kota Padang secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
			2. Unsur-unsur pembentukan gaji pada Bapenda Kota Padang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, bonus, dan iuran lainnya.
			3. Prosedur penggajian pada Bapenda Kota Padang mengacu pada Surat Perintah Membayar (SPM), sebagai bahan untuk dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengumpulan berkas berupa data kelengkapan pegawai dan merupakan faktor terpenting sebelum dilakukannya proses penggajian.
		2. Pengelolaan data penggajian pegawai selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengelolaan data penggajian, maka dari itu Bapenda Kota Padang menggunakan sistem penggajian secara komputerisasi untuk mencegah dan mempermudah dalam mengubah data yang mengalami perubahan.
		3. Dokumen atau formulir yang digunakan dalam prosedur pembayaran gaji pada Bapenda Kota Padang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam penggajian pegawai.

# 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Bapenda Kota Padang dalam melakukan tugasnya, yaitu :

1. Prosedur penggajian pegawai pada Bapenda Kota Padang seharusnya dibuatkan *flowchart* yang lebih rinci dan rapi, sehingga mempermudah pegawai dalam mengetahui prosedur penggajian pada Bapenda Kota Padang.
2. Pada proses pembayaran gaji pegawai diharapkan cepat dan tepat dalam menentukan waktu kapan melakukan pembayaran gaji pegawai Bapenda Kota Padang. Hal ini mengurangi terjadinya kekecewaan pegawai terhadap proses pembayaran gaji di Bapenda Kota Padang.